

Keadaan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang

Anggini¹, Emilia Susanti², Deni Supriadi Duha³, Fajri Riski⁴, Reonaldi⁵, Saifullah Rahman⁶

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Korespondensi penulis: 12310524665@students.uin-suska.ac.id

Abstract. *This article discusses Education in Indonesia during the Japanese Occupation. The purpose of this paper is to describe the influence of the Japanese occupation on education in Indonesia. This paper is the result of a historical study using heuristics, criticism, interpretation and historiography steps. During the Indonesian occupation, Japan carried out several educational policies, namely cultivating Japanese culture, reforming the education system, policies on curriculum and policies to Islamic education. So that during the colonial period, Japan had implemented policies in the field of education which had implications for various types and levels of education in Indonesia.*

Keywords: *Education, Indonesia, Japanese occupation*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. Adapun tujuan tulisan ini ingin mendeskripsikan pengaruh pendudukan Jepang terhadap Pendidikan di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil kajian historis dengan langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, melakukan beberapa kebijakan pendidikan yaitu penanaman budaya Jepang, reformasi system pendidikan, kebijakan pada kurikulum dan kebijakan pada pendidikan Islam. Sehingga selama menjajah, Jepang telah melakukan kebijakan bidang pendidikan yang berimplikasi pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan Indonesia.

Kata kunci: pendidikan, Indonesia, pendudukan Jepang

LATAR BELAKANG

Dimulai pada tahun 1942, ketika Soekarno dan M. Hatta melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pendudukan Jepang di nusantara yang saat itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda berakhir pada 17 Agustus 1945. Nazi Jerman menguasai Belanda pada Mei 1940, ketika Perang Dunia II pecah. Indonesia mengubah ekspornya untuk Kekaisaran Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris dan mengumumkan keadaan waspada. Setelah negosiasi yang gagal pada bulan Juni 1941 untuk mengamankan pasokan bahan bakar pesawat, Jepang mulai menduduki hampir seluruh Asia Tenggara pada bulan Desember tahun yang sama.

Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan dari Jepang untuk melakukan revolusi terhadap pemerintah Belanda. Sementara itu, pasukan Belanda terakhir yang dikalahkan oleh Jepang adalah pada bulan Maret 1942. Masa penjajahan Jepang di Indonesia pun dimulai.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teori dalam penelitian ini terdiri atas lima teori, yakni Kebijakan Penanam Budaya Jepang Melalui Pendidikan, Kebijakan Jepang Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia, Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Kurikulum Pendidikan di Indonesia, Mengetahui Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang, Kemerossotan Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yaitu suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis redaksional buku refrensi dan mengaitkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang di Indonesia. Penggunaan metode sejarah dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui Penggunaan metode sejarah dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui 4 tahap penelitian, yaitu: (1) Heuristik, menghimpun bahan-bahan atau sumber melalui studi kepustakaan, (2) Kritik sumber, menyeleksi data-data yang telah terkumpul melalui kritik intern dan kritik ekstern, (3) Interpretasi (4) Historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Jepang Datang ke Indonesia

Faktanya, imigrasi Jepang ke Indonesia dimulai sebelum Belanda menyerah pada tahun 1942. Dunia dilanda krisis ekonomi yang parah pada tahun 1937. Meskipun demikian, Jepang dapat memperkirakan dampak buruk dari kemerosotan dunia. Dalam bukunya “The Collapse of the Dutch East Indies” (1987:30), Onghokham menyatakan bahwa Jepang termasuk negara yang berhasil melewati krisis keuangan global. Berbeda dengan Hindia Belanda yang persoalan perekonomiannya menjadi perhatian utama. Menjadi lebih buruk pada saat itu. Jepang diizinkan bergabung dengan Hindia Belanda pada tahun 1938–1939 untuk berinvestasi dalam pemerintahan wilayah tersebut karena kondisi perekonomian yang buruk di sana.

Selain itu, salah satu pasar utama ekspor barang-barang dari Hindia Belanda yang kekayaan alamnya tersebar di seluruh nusantara adalah Jepang. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1938–1939 untuk melakukan investasi pada pemerintahan Hindia Belanda, sejak mereka masih berkuasa. Kini bersaing dengan negara-negara Eropa untuk pasar ekonomi. Mulai bulan Oktober 1941, ketika Jepang menaklukkan Indonesia, Jenderal Hideki Tojo mengambil alih jabatan Perdana Menteri menggantikan Konoe Fumimaro.

Meskipun pimpinan militer Jepang tidak ingin berperang melawan banyak negara sekaligus pada akhir tahun 1940, mereka memahami pada pertengahan tahun 1941 bahwa mereka harus menyerang Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda secara bersamaan untuk menguasai kekayaan alam di Jepang. Asia Tenggara. Embargo minyak Amerika, yang sangat merugikan industri dan kebutuhan militer Jepang, memperburuk keadaan. Panglima Angkatan Laut Jepang, Laksamana Isoroku Yamamoto, menyusun rencana pertempuran yang berani yang melibatkan pengerahan seluruh armadanya untuk dua misi penting.

Pada tanggal 7 Desember 1941, kekuatan pertama yang mencakup enam kapal induk, dua kapal perang, sebelas kapal perusak, dan hampir 1.400 pesawat tempur akan melancarkan serangan tak terduga terhadap pangkalan Armada Pasifik AS di Pearl Harbor, Hawaii. Angkatan Darat akan didukung oleh kekuatan kedua, yang terdiri dari sisa kekuatan Angkatan Laut Jepang, dalam Operasi Selatan, yang akan menargetkan serangan di Singapura, Malaya, dan Filipina sebelum melanjutkan ke Jawa. Laksamana Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan untuk menyerang Pearl Harbor, dan seluruh operasi dijadwalkan akan selesai dalam 150 hari. Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember 1941.

Jerman kemudian menyatakan perang terhadap Amerika Serikat tiga hari kemudian. Akibatnya, AS bergabung dengan pasukan Sekutu dan mulai berperang di Asia Pasifik dan Eropa. Perang Pasifik juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia. Jepang menginvasi dan menduduki Hindia Belanda dengan tujuan memperoleh minyak bumi dan sumber daya alam lainnya untuk memperkuat kekuatan ekonomi dan militer mereka. Sumatera dimaksudkan sebagai pemasok minyak yang signifikan, sedangkan Jawa dimaksudkan sebagai basis pendukung operasi militer di Asia Tenggara. Jepang kemudian masuk ke Indonesia dan berhasil menguasai Tarakan. Pada tanggal 29 dan 24 Januari 1942, mereka juga berhasil menguasai sejumlah tempat lain, termasuk Pontianak dan Balikpapan.

Selanjutnya, Jepang berhasil merebut Samarinda dan Banjarmasin dari Belanda antara tanggal 3 Februari dan 10 Februari 1942. Setelah penaklukan mereka atas Maluku dan Kalimantan, pasukan Jepang terus maju ke wilayah Sumatera. Jepang mulai mengerahkan tentara untuk menaklukkan Sumatera pada tanggal 14 Februari, 1942. Tepatnya pada tanggal 16 Februari 1942, dua hari kemudian Palembang dan sekitarnya berhasil ditaklukkan.

Jepang semakin ingin menguasai Pulau Jawa berkat kemenangan ini. Awal bulan Maret 1942, Jepang menginvasi wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan wilayah Kragan di Jawa Tengah. Pada tanggal 5 Maret 1942, ibu kota pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Batavia

(Jakarta), akhirnya berhasil dikuasai. Dua hari kemudian, mereka berhasil menguasai Bandung. Belanda dan Jepang berkumpul untuk berdiskusi pada tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat. Belanda menyetujui penyerahan tanpa syarat Jepang selama konferensi.

Jenderal Hitoshi Imamura, utusan Dai Nippon, mendapat wewenang atas wilayah Indonesia merangkap dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starckenborgh Stachouwer, dan Letnan Jenderal Heindrik Ter Poorten, Panglima Angkatan Bersenjata Belanda di Jawa. Sejak itu, tanah Indonesia telah diduduki secara militer oleh Jepang; namun demikian, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya setelah Jepang dikalahkan dalam Perang Asia Timur Raya.

Kebijakan Penanam Budaya Jepang Melalui Pendidikan

Strategi pendidikan awal Jepang adalah mengintegrasikan budaya Jepang ke dalam masyarakat Indonesia. Mendirikan Keimin Bunkha Shidôsho, atau Pusat Kebudayaan, sebuah organisasi kebudayaan yang bertugas mendidik dan mengembangkan seniman Indonesia serta menampilkan dan menyebarkan budaya Jepang. Sebagai upaya Jepang untuk memperkenalkan kebudayaan ke Indonesia.

Tindakan sebenarnya berupa mandat pengibaran bendera Jepang dan nyanyian Kimigayo, lagu nasional Jepang. Tentu saja, Jepang mengambil tindakan ini karena alasan yang kuat; pada kenyataannya, tujuan utamanya di Indonesia adalah penjajahan, itulah sebabnya menyanyikan lagu nasional Jepang diperlukan.

Aturan tambahannya adalah memulai setiap sesi belajar di semua tingkatan dengan membungkuk 90 derajat kepada Kaisar Jepang, Tenno Neika, yang dihormati oleh masyarakat Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari.

Budaya penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam bertentangan langsung dengan asimilasi pendidikan Seikeirei Jepang. Sehingga mendapat perlawanan dari beberapa organisasi Islam. Sayangnya, Jepang tetap memberlakukan peraturan tersebut meski mendapat tentangan dari sejumlah organisasi Indonesia. Akhirnya lahirlah sejumlah gerakan yang menentang kebijakan Jepang.

Hasyim Asy'ari, seorang tokoh pendidikan, menentang kebijakan Jepang. Pemerintah Jepang mengkritik Hasyim Asy'ari sebagai konsekuensinya, dan ia ditahan selama enam bulan di Jombang, Mojokerto, dan Bubutan. Sejumlah kiai dan santri mengungkapkan komitmen dan pengabdianya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan meminta untuk dipenjara bersamanya.

Kebijakan Jepang Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang, dapat dikemukakan sebagai berikut ini :

1. Pendidikan Dasar (Sekolah Rakyat, Kokumin Gakko). Setelah enam tahun pendidikan. Sekolah Pertama yang didalamnya terdapat SR, dulunya adalah sekolah dasar tiga atau lima tahun siswa pribumi di Hindia Belanda.
2. Pembelajaran Tambahan. Ada dua pilihan untuk pendidikan pasca sekolah menengah: tiga tahun studi untuk Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dan tiga tahun untuk Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Atas).
3. Pendidikan Karier-Perdagangan. Terdiri dari sekolah menengah kejuruan, seperti sekolah teknik, pertanian, pertukangan kayu, perkapalan, dan pengajaran.
4. Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Selama Jepang berkuasa, ada beberapa kebijakan dalam bidang kurikulum yang dilakukan oleh Jepang yaitu :

1. Kurikulum Pengajaran Bahasa Indonesia. Jepang mengubah kurikulum, khususnya bahasa permulaan, sehingga bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama pengajaran materi pelajaran. Banyak sekali penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia masih diajarkan di sekolah sebagai topik dan digunakan sebagai bahasa pengantar resmi. Yang berubah kemudian hanyalah imbalan berupa mempelajari tradisi Jepang dan diakui sebagai pelajaran.
2. Dualitas Pengajaran Penghapusan Kurikulum. Jepang membubarkan seluruh lembaga pendidikan yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tidak ada penerapan sistem dualistik yang terdiri atas pendidikan Barat dan pendidikan putra bumi. Semua kelas sosial secara eksklusif bersekolah di Sekolah Rakyat, juga dikenal sebagai Kokumun Gakoo, dan Sekolah Desa, yang masih beroperasi tetapi diberi nama Sekolah Pertama.
3. Pada zaman Jepang, para pendidik pengajar diharuskan menyelesaikan enam tahun Sekolah Rakyat, yang meliputi sekolah menengah pertama, tiga tahun sekolah menengah pertama yang setara dengan sekolah menengah pertama saat ini, dan tiga tahun sekolah menengah atas yang setara dengan sekolah menengah atas saat ini. Sekolah.
4. Kurikulumnya mencakup mata pelajaran umum seperti geografi, aritmatika, dan bahasa Indonesia yang dapat diajarkan. Kemudian pengajaran bahasa Jepang dimulai pada tahun 1942.

Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang

Jika tujuan kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda adalah Kristenisasi, maka terjadi perubahan yang signifikan pada masa pendudukan Jepang karena agama Kristen bukanlah inti kebudayaan Jepang. Tujuan kebijakan pendidikannya yang unik adalah untuk mengubah negara dan populasi Muslim di Indonesia yaitu, untuk mentransplantasikan budaya Indonesia ke aliran Nippon, seperti yang dilakukan Manchuria, Korea, dan Formosa (Taiwan) sebelum Perang Dunia II. Motto “Tiga A” adalah salah satu contoh bagaimana upaya nipponisasi terlihat jelas di sejumlah gerakan, termasuk yang sudah terdaftar.

Satu-satunya tujuan ungkapan ini adalah untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia, khususnya komunitas Muslim, terhadap kepemimpinan Jepang dalam Perang Asia. Dilarang menggunakan bahasa seperti Inggris, Amerika, dan Belanda untuk komunikasi tertulis atau lisan karena bahasa Nipponisasi. Juga dilarang menggunakan bahasa Arab asli. Pembatasan ini juga diterapkan pada kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan sekolah.

Hanya bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan bahasa Jepang sebagai bahasa kedua yang boleh digunakan dalam komunikasi, termasuk pendidikan, menurut pemerintah Jepang. Larangan berbicara bahasa tertentu, khususnya bahasa Belanda, bertujuan untuk membalikkan pengaruh imperialis Belanda yang telah lama merasuki Indonesia dalam berbagai cara. Pertumbuhan bahasa Indonesia diuntungkan dengan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang pendidikan.

Orang-orang yang belum pernah berbicara bahasa Indonesia sebelumnya namun kini lebih fasih berbahasa Indonesia kini tinggal di daerah pedesaan. Propaganda adalah salah satu taktik propaganda Jepang. Mayoritas penduduk pedesaan tidak berpendidikan dan memiliki tingkat pendidikan rendah, oleh karena itu propaganda digunakan untuk menjangkau mereka melalui hiburan seperti drama, film layar lebar, wayang kulit, tari, nyanyian, dan radio.

Indoktrinasi adalah metode Nipponisasi berikutnya. Jepang mendirikan forum-forum pelatihan perjuangan, seperti Hizbullah yang banyak dianut oleh para santri, dan Kiai. Forum lainnya adalah Seindojo (Pusat Latihan Militer), Seinekurensho (Pusat Latihan Pemuda), Seindean (Front Pemuda), Keibodan (Kelompok Pembantu Polisi), dan Peta (Pembela Tanah Air). Mereka diikutsertakan untuk mendapatkan indoktrinasi dan pelatihan kader. 12 Instrumen terbaik untuk mendapatkan pengaruh di daerah pedesaan di Jepang adalah ulama. Penjajahan Belanda berhasil ditumbangkan oleh kelakuan cerdik bangsa Jepang.

Pemerintah Jepang percaya bahwa bentuk cuci otak ini adalah yang paling berhasil. Pikiran ulama dan Kiai diperkirakan akan tertanam dalam konsep Nipponist setelah masa

sekolah dan karantina selama 30 hari. Karena dampak sosialnya yang signifikan. Asumsi ini tampaknya tidak sepenuhnya benar dan disadari, dalam sudut pandang penulis. Untuk melancarkan pemberontakan melawan kekuasaan kolonial Jepang, sejumlah besar kiai dan ulama akhirnya melancarkan gerakan pembebasan.

Salah satu contohnya adalah gerakan perlawanan Aceh yang dipelopori oleh Ulama Tengku Abdul Jalil, seorang pengajar muda mengaji di Cot Plieng Lok Seumawe. Setelah upaya Jepang untuk berunding dengan pendeta tersebut gagal, Jepang melancarkan serangan tak terduga di pagi hari saat masyarakat sedang berdoa. Penduduk setempat berusaha mengusir pasukan Jepang dengan menggunakan senjata mentah, dan mereka berhasil memaksa mereka mundur kembali ke Lhokseumawe. Demikian pula, masyarakat menggagalkan upaya kedua. Baru pada upaya ketiga dan terakhir Jepang berhasil membakar masjid. Teuku Abdul Jalil, panglima pemberontak, akhirnya tertembak saat sedang salat setelah berhasil lolos dari kepungan musuh.

Selain itu, peristiwa lain terjadi pada tahun 1943 di Pondok Pesantren Sukamanah Jawa Barat (Singaparna) yang dipimpin oleh KH. Zainal Mustafa. Ia sangat tidak setuju dengan kepercayaan masyarakat Jepang, terutama kewajiban melaksanakan Seikerei, atau sujud pagi ke matahari terbit sebagai tanda penghormatan kepada Kaisar Jepang. Karena kewajiban Seikerei ini melibatkan kesyirikan dan menyekutukan Tuhan, hal ini jelas merugikan umat Islam Indonesia. ‘sentimen. 16 Selain itu, ia tidak tahan menyaksikan penderitaan akibat tanam paksa yang menimpa para petani. Dua contoh di atas menunjukkan kegagalan program cuci otak Jepang. Justru memperkuat rasa patriotisme dan nasionalisme masyarakat terhadap bangsa dan negara.

Kemerosotan Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang

Pendidikan berkembang jauh lebih lambat pada masa pendudukan Jepang dibandingkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan yang ditetapkan Jepang untuk hanya menggunakan sumber daya alam dan manusia telah mengakibatkan kemerosotan kuantitas dan kualitas pendidikan. Pendidikan militer Jepang terhadap generasi muda Indonesia hanya bertujuan untuk mendukung kepentingan Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang lebih menekankan pada bidang-bidang selain pendidikan, termasuk pendidikan sosial, administrasi, dan propaganda. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Jepang untuk memperbaiki dan mendidik masyarakat masih jauh dari harapan.

Program pendidikan Jepang selama satu setengah tahun bagi masyarakat Indonesia tidak berlangsung lama. Kemudian, sebagai bagian dari program Nipponisasi, Jepang

mengumumkan strategi baru pada bulan September 1943 yang memberikan pelatihan militer kepada Indonesia. Selain itu, Rickfles (2007: 410) menyatakan bahwa pada masa penjajahan Jepang atau perang, pendidikan tinggi di Indonesia sama sekali tidak memungkinkan. Struktur pemerintahan Jepang dan berbagai otoritas mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendidikan antara tahun 1942 dan 1945. Struktur tersebut memaksa siswa untuk berpartisipasi dalam pelatihan militer dan mengabaikan tugas-tugas di kelas, sehingga menyebabkan kualitas pendidikan yang rendah dan angka putus sekolah yang tinggi.

Permasalahan putus sekolah pada masa pendudukan Jepang bermula dari memburuknya pendidikan dan pengajaran yang membuat sebagian besar orang tua enggan melanjutkan pendidikan anaknya hingga lulus, padahal anaknya mampu atau tidak menghadapi kendala keuangan. Masyarakat Indonesia diperlakukan secara tidak pantas akibat mobilisasi sosial atas nama perang. Banyak anak sekolah yang menderita pencabutan kepala dan seringnya pemukulan di kepala. Hal ini juga berkontribusi pada banyaknya siswa yang putus sekolah karena orang tua mereka merasa tidak dapat ditoleransi melihat anak-anak mereka dianiaya.

Menurut Wahyudi Nasution (2017), Konon sekelompok kecil anak muda mulai keberatan dengan tingkah laku tentara Jepang yang berubah-ubah setelah itu. Selain mendapat pelatihan menjadi prajurit tentara Jepang, masyarakat Indonesia juga diinstruksikan menjadi pekerja pengabdian masyarakat atau kinrohosi dan romusha. Orang tua mungkin percaya bahwa bersekolah hanya membuang-buang waktu karena penekanannya diberikan pada aktivitas fisik seperti senam, pelatihan tempur, upacara, dan persiapan pawai.

Dapat disimpulkan bahwa banyak siswa yang mengambil keputusan putus sekolah karena buruknya kualitas pengajaran yang disebabkan oleh pemerintah mengganti kegiatan non-pendidikan (seperti sains) dengan kegiatan yang lebih fokus pada pelatihan militer, sehingga mengakibatkan kerugian. penurunan tajam populasi pelajar pada masa pendudukan Jepang.

Tantangan ekonomi adalah faktor lain yang menghambat siswa menyelesaikan pendidikannya. Pemerintah Belanda menawarkan bantuan pendidikan kepada warga Indonesia, sedangkan pemerintah Jepang tidak mengikuti. Dana sekolah dikumpulkan melalui kerja paksa (romusha) di seluruh Kekaisaran Jepang. Meskipun pemerintah Jepang mengawasi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, sebagian besar uang yang diperoleh melalui kerja paksa digunakan untuk keperluan militer, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk Pendidikan.

Jumlah siswa sekolah dasar berkurang 30% dan siswa sekolah menengah pertama berkurang 90% pada masa pendudukan Jepang. Terdapat sangat sedikit universitas pada awal tahun 1942 karena pengurangan jumlah sekolah dasar, yang sebelumnya berjumlah 21.500, menjadi 13.500 sekolah, sekolah menengah, yang sebelumnya berjumlah 850, menjadi 20, dan penutupan sekolah yang hampir seluruhnya. universitas bekas kolonial Belanda (Syaharuddin & Susanto, 2019: 56). Namun mulai tahun 1943, pemerintah membuka kembali perguruan tinggi satu per satu, sehingga meningkatkan jumlahnya.

Selain itu, kejatuhan tersebut terjadi karena tidak ada lagi sekolah yang diizinkan buka setelah Jepang menguasainya. Salah satu penyebabnya adalah Jepang menutup semua sekolah yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai upaya untuk menghilangkan pengaruh Barat dari penduduk pribumi. Selain itu, belum ada persiapan yang dilakukan karena ada beberapa tantangan yang harus segera diatasi, khususnya yang berkaitan dengan guru, karena pemerintah bekas kolonial Belanda tidak mengakui Indonesia.

Sebenarnya, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas haruslah adil, seimbang, dan bermanfaat bagi negara dan warga negaranya. Untungnya, masyarakat Indonesia kini dapat merancang sistem pendidikannya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan budaya negaranya karena mereka adalah bangsa yang mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap upaya kolonial yang dilakukan suatu negara besar berupaya untuk menggunakan otoritas atas suatu wilayah di sejumlah bidang, termasuk pendidikan. Karena Jepang merupakan bagian dari Perang Dunia II, tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang tidak dilaksanakan secara transparan atau dipublikasikan secara umum. Jika dibandingkan pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan di Indonesia mungkin bisa dikatakan kurang mendapat perhatian, terutama karena Jepang sedang sibuk memenangkan perang melawan Sekutu.

Pada masa pendudukan Jepang, tujuan pendidikan adalah mempersiapkan kekuatan yang mampu membantu Jepang memenangkan Perang Pasifik. Selain itu, sekolah-sekolah peninggalan Belanda ditutup dan dibuka kembali dengan banyak modifikasi. Pendidikan menurun pada masa pendudukan Jepang karena tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan angkatan kerja dan militer untuk berperang. Hal ini ditandai dengan penurunan pendaftaran sekolah dasar sebesar tiga puluh persen, penurunan pendaftaran sekolah menengah sebesar sembilan puluh persen, penurunan pendaftaran guru sekolah dasar sebesar

tiga puluh lima persen, dan penurunan. Pendaftaran guru sekolah menengah sebesar sembilan puluh lima persen.

Namun demikian, penerapan sistem pendidikan ini pada masa pendudukan Jepang mempunyai sejumlah dampak yang menguntungkan, seperti penghapusan diskriminasi, meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia di seluruh negeri, dan pengembangan kemampuan fisik generasi muda, yang akan sangat membantu di masa depan perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Saran yang bisa saya berikan hanyalah jangan hanya membaca materi yang Kami sampaikan. Para pembaca bisa membaca materi-materi ini dari buku-buku atau Sumber lainnya terkait akan materi ini. Disini kami hanya merangkum inti dari materi Ini, tidak lebih dari itu. Kami juga menyarankan untuk memahami materi yang telah Kami rangkum disini. Pahami dengan baik dan juga enar.

DAFTAR REFERENSI

- Irawan, H., & Yulianto, E. (2019). Pendidikan Di Pulau Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(1).
- Wahyudi, A. (2017). Perbandingan Sistem Pendidikan Di Indonesia Pada masa Kolonial Belanda (1900-1942) Dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). In *Skripsi, Universitas Jember*.
- Syahrudin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia. In *Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat* (Vol. 53, Issue 9).
- <https://www.gramedia.com/literasi/masa-penjajahan-jepang/>
- Abbas, A. (2018). Pendidikan di Indonesia Pada Masa Jepang. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam*, 4(1), 64–70.
- Putri, Arum S. (2020). Akibat Pendudukan Jepang di Bidang Sosial Budaya", dalam <https://www.kompas.com/skola/read/20201>.
- Yusrianto, Y. (2017). Pemikiran politik dan perjuangan KH. M. Hasyim asy'ari melawan kolonialisme. in *right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3(2).
- Suwendi. (2004). *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.